

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan I Sertifikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Fitri Adhi Nugroho, *Studi Penguasaan Tanah PT. Kereta Api (Persero) di Kecamatan Demak dan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi STPN, Yogyakarta, 2004
- M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2015.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Saleh Wantjik.K. *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1976.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir*

Dari Hubungan Kontraktual, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Zein Ramli, *Hak Pengelolaan Dalam Undang – Undang Pokok Agraria*,

Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria

Undang - Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang – undang Nomor 57 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk

Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum

Kereta Api

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo
Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13 Ayat (5).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun
1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara .

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bukittinggi.

C. Sumber lain

www.shanovasha.blogspot.co.id/2015/04/tugas-2-aspek-hukum-dalam-ekonomi-bab-5

www.wikipedia.org, *Sejarah PT. Kereta Api Indonesia*

<http://portal.bumn.go.id/keretaapi>

Rencana Strategis Nasional Kementrian Perhubungan Tahun 2015-2019.

Harian Haluan edisi 15 Desember 2017

